



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
DIREKTORAT PEMBINAAN ADMINISTRASI PERADILAN UMUM
Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3,4 dan 5
Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 ByPass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat
Telp. (021) 29079176 Ext. 1521, Fax. (021) 29079201

Nomor : 1961/DJU/TI.1.X/2024 Jakarta, 3 Oktober 2024
Lampiran : 4 (empat) lembar
Hal : Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) tertinggi
dan yang belum mencapai standar nilai EIS
Periode Oktober Tahun 2024

Yth. 1. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Ketua Pengadilan Negeri
di
Seluruh Indonesia

Sehubungan hasil monitoring dan evaluasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terhadap pelaksanaan Implementasi SIPP di seluruh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri pada bulan September tahun 2024 berdasarkan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 478/DJU/TI.1.III/2024 Hal Revisi penilaian pada aplikasi Evaluasi Implementasi SIPP Pengadilan Negeri, dengan ini diumumkan Penilaian Evaluasi Implementasi SIPP Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus, Penilaian Evaluasi Implementasi SIPP tertinggi pada 5 (lima) Pengadilan Negeri Klas IA, Pengadilan Negeri Klas IB dan II dengan penilaian tertinggi berdasarkan jumlah beban perkara. Selain itu juga disampaikan daftar pengadilan yang belum mencapai standar minimal nilai Evaluasi Implementasi SIPP untuk menerapkan register elektronik. Kategori penilaian sebagai berikut :

I. PENGADILAN TINGGI :

1. Kinerja

- Rasio penanganan perkara banding
- Jangka waktu penyelesaian perkara banding
- Jangka waktu pengiriman kembali berkas ke pengadilan pengaju
- Rasio pendaftaran perkara banding secara elektronik

2. Kepatuhan

- Pelaksanaan verifikasi berkas perkara
- Pendaftaran perkara banding
- Penetapan Majelis Hakim
- Penunjukan Panitera Pengganti
- Input penetapan Majelis Hakim / Hakim
- Input penunjukan Panitera Pengganti
- Verifikasi salinan putusan pada perkara banding elektronik (eCourt)
- Input penetapan hari sidang
- Input pertimbangan hukum
- Input putusan
- Penetapan hari sidang

- Tanda Tangan Elektronik Salinan Putusan Perkara

3. Kelengkapan

- Dokumen elektronik putusan
- Prosentase Upload ke Direktori Putusan

II. PENGADILAN NEGERI :

1. Kinerja

- Penyelesaian perkara tepat waktu
- Rilis versi SIPP
- Kesesuaian kode satker nomor perkara
- Jangka waktu pelaksanaan delegasi masuk

2. Kepatuhan

- | | |
|---|----------------------------------|
| - Pendaftaran perkara | - Penginputan putusan akhir |
| - Pencatatan barang bukti | - Penginputan minutasi |
| - Penetapan Hakim | - Pelaksanaan minutasi |
| - Penetapan Panitera Pengganti | - Penginputan permohonan banding |
| - Penetapan Jurusita/Jurusita Pengganti | - Penginputan permohonan kasasi |
| - Penetapan hari sidang pertama | - Penginputan permohonan PK |
| - Penginputan tuntutan | - Pengiriman berkas banding |
| - Pengiriman berkas kasasi | - Pengiriman berkas PK |
| - Pemberitahuan putusan / penetapan | - Unggah Putusan Akhir |
| - Penginputan penetapan Majelis/Hakim | - Penginputan penetapan PP |
| - Penginputan penetapan hari sidang | |
| - Penginputan penetapan Jurusita/JSP | |
| - Penginputan Data Pelaksanaan Delegasi | |
| - Kepatuhan Penundaan Jadwal Sidang | |
| - Kepatuhan Penundaan Perpanjangan Penahanan | |
| - Tanda Tangan Elektronik Salinan Putusan Perkara Perdata | |
| - Tanda Tangan Elektronik Salinan Putusan Perkara Pidana | |

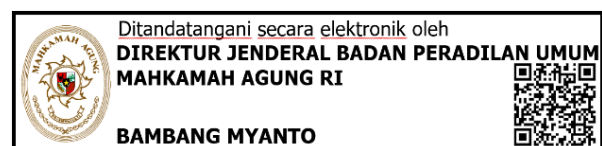
3. Kelengkapan

- | | |
|---|-----------------------|
| - E-Document dakwaan/petitum | - Data lapor mediasi |
| - Pencatatan saksi | - Data diversi |
| - E-Document tuntutan | - Data nilai sengketa |
| - E-Document putusan akhir/penetapan | |
| - Dokumen elektronik berita acara sidang | |
| - Dokumen elektronik relaas panggilan sidang pertama | |
| - Dokumen elektronik rencana persidangan (<i>Court Callendar</i>) | |
| - Dokumen elektronik putusan anonimisasi | |

4. Kesesuaian

- Agenda sidang terakhir
- Tanggal putusan dan tanggal sidang terakhir
- Publikasi pihak
- Pengisian BHT
- Penahanan
- Sisa biaya perkara tingkat pertama
- Pelaksanaan sinkronisasi SIPP WEB
- Verifikasi dokumen elektronik elitigasi
- Pelaksanaan sinkronisasi SIPP ke Data Center MARI
- Pengarsipan Perkara

Apresiasi / penghargaan kami sampaikan kepada seluruh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang telah melakukan banyak perbaikan dalam mengimplementasikan SIPP, namun bagi Pengadilan-pengadilan Negeri yang belum mencapai penilaian implementasi SIPP sesuai standar karena hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, diharapkan agar dapat mendorong perbaikan kinerjanya.



Tembusan:

1. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
2. YM Ketua Kamar Pengawasan;
3. Yth Ketua Kamar Pembinaan;

EVALUASI SIPP PT SEPTEMBER 2024

I. Nilai Implementasi SIPP Pengadilan Tinggi dengan perkara 1 s/d 300

No.	JUMLAH PERKARA	PENGADILAN	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	TOTAL
1	1~300	Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat	343,13	550,00	100,00	993,13
2	1~300	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	346,00	550,00	97,06	993,06
3	1~300	Pengadilan Tinggi Gorontalo	343,94	550,00	97,06	991,00

II. Nilai Implementasi SIPP Pengadilan Tinggi dengan perkara 301 s/d 1000

No.	JUMLAH PERKARA	PENGADILAN	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	TOTAL
1	301~1000	Pengadilan Tinggi Jambi	344,90	550,00	100,00	994,90
2	301~1000	Pengadilan Tinggi Palembang	341,95	550,00	100,00	991,95
3	301~1000	Pengadilan Tinggi Banten	341,30	550,00	100,00	991,30

III. Nilai Implementasi SIPP Pengadilan Tinggi dengan perkara diatas 1000

No.	JUMLAH PERKARA	PENGADILAN	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	TOTAL
1	>1000	Pengadilan Tinggi Semarang	346,82	549,75	99,68	996,25
2	>1000	Pengadilan Tinggi Surabaya	338,75	550,00	99,71	988,46
3	>1000	Pengadilan Tinggi Makassar	337,59	549,80	99,74	987,13

EVALUASI IMPLEMENTASI SIPP PENGADILAN NEGERI PERIODE SEPTEMBER TAHUN 2024

I. Nilai Implementasi SIPP Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus

No	PENGADILAN	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	TOTAL
1	Pengadilan Negeri Surakarta	97%	99%	100%	99%	98.65%
2	Pengadilan Negeri Palembang	95%	97%	99%	98%	97.25%
3	Pengadilan Negeri Surabaya	94%	98%	100%	97%	97.14%
4	Pengadilan Negeri Sidoarjo	94%	99%	95%	99%	96.82%
5	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	92%	96%	98%	98%	96.10%
6	Pengadilan Negeri Jakarta Utara	92%	98%	94%	98%	95.34%
7	Pengadilan Negeri Bekasi	94%	97%	94%	94%	94.88%
8	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	92%	92%	97%	96%	94.20%
9	Pengadilan Negeri Semarang	94%	94%	90%	98%	94.15%
10	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	87%	96%	97%	96%	94.02%
11	Pengadilan Negeri Medan	93%	92%	89%	94%	91.94%
12	Pengadilan Negeri Bandung	93%	93%	87%	92%	91.36%
13	Pengadilan Negeri Tangerang	78%	93%	92%	94%	89.48%
14	Pengadilan Negeri Makassar	95%	89%	83%	91%	89.41%
15	Pengadilan Negeri Jakarta Timur	76%	89%	64%	90%	79.92%

II. Pengadilan Negeri Kelas IA dengan perkara diatas 2000 dengan Nilai Implementasi SIPP Tertinggi

No	JML PERKARA	PENGADILAN	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	TOTAL
1	>2000	Pengadilan Negeri Pekanbaru	96%	97%	99%	99%	97.50%
2	>2000	Pengadilan Negeri Jember	96%	98%	99%	96%	97.35%
3	>2000	Pengadilan Negeri Mojokerto	97%	99%	97%	93%	96.50%

Unsur tidak wajib jika tidak ada tidak menjadi pembagi sesuai surat Dirjen Nomor 478/DJU/VI.1.1/III/2024

III. Pengadilan Negeri Kelas IA dengan perkara diatas **1001 s/d 2000** dengan Nilai Implementasi **SIPP Tertinggi**

No	JML PERKARA	PENGADILAN	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	TOTAL
1	1001~2000	Pengadilan Negeri Ambon	94%	98%	100%	98%	97.58%
2	1001~2000	Pengadilan Negeri Yogyakarta	96%	99%	96%	98%	97.30%
3	1001~2000	Pengadilan Negeri Mataram	96%	98%	95%	98%	96.74%

IV. Pengadilan Negeri Kelas IA dengan perkara diatas **1 s/d 1000** dengan Nilai Implementasi **SIPP Tertinggi**

No	JML PERKARA	PENGADILAN	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	TOTAL
1	1~1000	Pengadilan Negeri Klaten	97%	100%	100%	100%	99.11%
2	1~1000	Pengadilan Negeri Cilacap	97%	100%	100%	100%	99.02%
3	1~1000	Pengadilan Negeri Tasikmalaya	96%	99%	100%	100%	98.86%

V. Pengadilan Negeri Kelas IB dengan perkara diatas **1001 s/d 2000** dengan Nilai Implementasi **SIPP Tertinggi**

No	JML PERKARA	PENGADILAN	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	TOTAL
1	1001~2000	Pengadilan Negeri Bojonegoro	96%	100%	98%	99%	98.43%
2	1001~2000	Pengadilan Negeri Baturaja	100%	99%	95%	98%	97.96%
3	1001~2000	Pengadilan Negeri Kisaran	96%	99%	95%	100%	97.66%
4	1001~2000	Pengadilan Negeri Tuban	96%	100%	96%	99%	97.64%
5	1001~2000	Pengadilan Negeri Karawang	96%	100%	95%	98%	97.23%

VI. Pengadilan Negeri Kelas IB dengan perkara diatas **501 s/d 1000** dengan Nilai Implementasi **SIPP Tertinggi**

No	JML PERKARA	PENGADILAN	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	TOTAL
1	501~1000	Pengadilan Negeri Kalianda	98%	100%	99%	100%	99.19%
2	501~1000	Pengadilan Negeri Lumajang	97%	99%	100%	100%	98.93%
3	501~1000	Pengadilan Negeri Jepara	97%	100%	99%	100%	98.93%
4	501~1000	Pengadilan Negeri Gunung Sugih	96%	100%	100%	100%	98.92%
5	501~1000	Pengadilan Negeri Tarakan	100%	99%	99%	98%	98.92%

VII. Pengadilan Negeri Kelas IB dengan perkara diatas **1 s/d 500** dengan Nilai Implementasi **SIPP Tertinggi**

No	JML PERKARA	PENGADILAN	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	TOTAL
1	1~500	Pengadilan Negeri Purbalingga	96%	100%	100%	100%	99.02%
2	1~500	Pengadilan Negeri Banjarnegara	96%	100%	99%	100%	98.84%
3	1~500	Pengadilan Negeri Martapura	97%	100%	99%	99%	98.76%
4	1~500	Pengadilan Negeri Bukittinggi	96%	99%	98%	100%	98.25%
5	1~500	Pengadilan Negeri Wonogiri	97%	98%	99%	99%	98.22%

VIII. Pengadilan Negeri Kelas II dengan perkara diatas **501 s/d 1000** dengan Nilai Implementasi **SIPP Tertinggi**

No	JML PERKARA	PENGADILAN	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	TOTAL
1	501 ~ >1000	Pengadilan Negeri Trenggalek	96%	100%	100%	100%	98.99%
2	501 ~ >1000	Pengadilan Negeri Magetan	96%	100%	99%	100%	98.56%
3	501 ~ >1000	Pengadilan Negeri Menggala	98%	99%	96%	100%	98.41%
4	501 ~ >1000	Pengadilan Negeri Lahat	97%	99%	97%	100%	98.13%
5	501 ~ >1000	Pengadilan Negeri Pangkalan Balai	95%	98%	98%	100%	97.88%

IX. Pengadilan Negeri Kelas II dengan perkara diatas **1 s/d 500** dengan Nilai Implementasi **SIPP Tertinggi**

No	JML PERKARA	PENGADILAN	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	TOTAL
1	1~500	Pengadilan Negeri Sengeti	100%	99%	100%	100%	99.70%
2	1~500	Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat	100%	98%	99%	99%	99.04%
3	1~500	Pengadilan Negeri Prabumulih	96%	100%	100%	100%	98.94%
4	1~500	Pengadilan Negeri Masohi	96%	100%	99%	100%	98.90%
5	1~500	Pengadilan Negeri Rote Ndao	96%	100%	99%	100%	98.78%

X. Pengadilan Negeri dengan Nilai Implementasi **SIPP Dibawah 90%**

No	PENGADILAN	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	TOTAL
1	Pengadilan Negeri Sibuhuan	93%	96%	71%	99%	89.90%
2	Pengadilan Negeri Saumlaki	93%	91%	89%	87%	89.89%
3	Pengadilan Negeri Bengkulu	96%	93%	79%	92%	89.80%
4	Pengadilan Negeri Gunung Sitoli	94%	94%	87%	83%	89.50%
7	Pengadilan Negeri Balikpapan	90%	94%	84%	89%	89.18%
8	Pengadilan Negeri Tebing Tinggi	81%	98%	93%	84%	89.16%
9	Pengadilan Negeri Muaro	96%	87%	84%	89%	88.98%
10	Pengadilan Negeri Kuala Kurun	81%	98%	83%	94%	88.97%
11	Pengadilan Negeri Singaraja	81%	97%	87%	91%	88.79%
12	Pengadilan Negeri Arga Makmur	80%	95%	84%	95%	88.50%
13	Pengadilan Negeri Pulang Pisau	81%	99%	78%	95%	88.47%
14	Pengadilan Negeri Amuntai	96%	100%	68%	90%	88.29%
15	Pengadilan Negeri Pasangkayu	96%	98%	77%	82%	88.28%
16	Pengadilan Negeri Tubei	96%	86%	81%	89%	88.25%
17	Pengadilan Negeri Lasusua	96%	86%	81%	89%	88.04%

No	PENGADILAN	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	TOTAL
18	Pengadilan Negeri Jeneponto	96%	92%	71%	92%	87.99%
19	Pengadilan Negeri Sampang	94%	89%	77%	90%	87.72%
20	Pengadilan Negeri Malinau	96%	99%	77%	77%	87.37%
21	Pengadilan Negeri Banjarmasin	83%	89%	80%	97%	87.33%
22	Pengadilan Negeri Sabang	81%	90%	85%	91%	86.95%
23	Pengadilan Negeri Raba/bima	96%	90%	79%	83%	86.90%
24	Pengadilan Negeri Sintang	81%	94%	76%	95%	86.40%
25	Pengadilan Negeri Sinabang	96%	92%	65%	91%	86.38%
26	Pengadilan Negeri Kepahiang	81%	90%	82%	91%	86.16%
27	Pengadilan Negeri Belopa	81%	90%	74%	97%	85.31%
28	Pengadilan Negeri Manokwari	92%	81%	77%	90%	85.16%
29	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	81%	88%	79%	92%	85.08%
30	Pengadilan Negeri Namlea	81%	93%	72%	93%	84.84%
31	Pengadilan Negeri Bale Bandung	77%	88%	84%	91%	84.69%
32	Pengadilan Negeri Bintuhan	96%	85%	70%	87%	84.52%
33	Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa	96%	84%	68%	89%	84.43%
34	Pengadilan Negeri Dobo	96%	95%	54%	92%	84.34%
35	Pengadilan Negeri Situbondo	81%	88%	64%	95%	82.01%
37	Pengadilan Negeri Padang	92%	79%	64%	83%	79.54%
38	Pengadilan Negeri Tapaktuan	81%	85%	65%	76%	76.81%
39	Pengadilan Negeri Blangpidie	81%	60%	73%	75%	72.21%
40	Pengadilan Negeri Tobelo	94%	44%	73%	64%	68.86%

Data ditarik Tanggal 2 Oktober 2024 Jam 21.10